

**PENGARUH KUALITAS APARATUR PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAN IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)
TERHADAP PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE* (GG)
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat daerah di Kota Padang)**

Skripsi



Yulia Fitrina

2005/67628

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2011

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH KUALITAS APARATUR PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAN IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)
TERHADAP PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE* (GG)
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat daerah di Kota Padang)**

Nama : YULIA FITRINA
NIM/BP : 67628/2005
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, April 2011

Disetujui Oleh:

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Eka Fauzihardani, SE, M. Si, Ak
NIP. 19710522 20003 2 001

Charoline Cheisviyanny SE, M.Ak
NIP. 19801019 200604 2 002

Mengetahui,
Ketua Prodi Akuntansi

Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang

**PENGARUH KUALITAS APARATUR PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAN IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)
TERHADAP PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE (GG)
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat daerah di Kota Padang)**

Nama : YULIA FITRINA
NIM/BP : 67628/2005
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, April 2011

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Eka Fauzihardani, SE, M. Si, Ak	1. _____
2.	Sekretaris	Charoline Cheisvianny SE, M.Ak	2. _____
3.	Anggota	Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	3. _____
4.	Anggota	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	4. _____

ABSTRAK

Yulia Fitriana : Pengaruh Kualitas Aparatur Penatausahaan Keuangan dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Pelaksanaan *Good Governance* (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang)

Pembimbing I : Eka Fauzihardani, SE, M. Si, Ak

II : Charoline Cheisvianny, SE, M.AK, AK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) Pengaruh kualitas aparatur penatausahaan keuangan terhadap pelaksanaan *good governance*. (2) Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan terhadap *good governance*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Padang. Metode pengambilan sampel adalah *Total Sampling* dengan responden yaitu kepala SKPD dan kepala bagian keuangan. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Kualitas aparatur penata laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan *good governance* dengan nilai signifikan $0,00 < 0,05$ nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 0,521 (hipotesis 1 diterima). (2) Implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan *good governance* dengan nilai signifikan β $0,002 < 0,05$ nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif yaitu 0,432 (hipotesis 2 diterima).

Dalam penelitian ini sebaiknya Pemerintah Kota Padang lebih meningkatkan pemahaman dalam menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh setiap SKPD lengkap serta dapat menyerahkan laporan keuangan kepada pengguna anggaran untuk diotorisasi tepat pada waktunya. Serta Pemerintah Kota Padang lebih meningkatkan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip-prinsip *Good Governance*. Sedangkan untuk peneliti selanjutnya sebaiknya digunakan metode variabel intervening dalam penelitian ini, dan dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian agar hasil penelitian lebih baik dan akurat lagi.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kualitas Aparatur Penatausahaan Keuangan Dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Pelaksanaan *Good Governance* (GG)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Strata Satu (S1), pada Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Terimakasih kepada Ibu Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak, selaku pembimbing I dan Ibu Charoline Cheisvianny, SE, M.Ak selaku pembimbing II, yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu, dan bimbingan serta masukan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung telah mendorong penulis untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

4. Kedua orang tua dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
5. Teman-teman mahasiswa angkatan 2005 dan 2006 pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, dan informasi yang sangat berguna.
6. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan pengetahuan serba terbatas penulis berusaha menyajikan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun kesempurnaan penulis skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Padang, April 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah	11
D. Perumusan Masalah	11
E. Tujuan Penulisan	11
F. Manfaat Penulisan	11
BAB II KAJIAN TEORETIS, KERANGKA KONSEPTUAL	
DAN HIPOTESIS	13
A. Kajian Teori	13
1. Good Governance	13
1.1 Pengertian <i>Good Governance</i>	13
1.2 Karakteristik <i>Good Governance</i>	15
2. Kualitas Aparatur Penata Laporan Keuangan	21
3. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah.....	23
3.1 Standar Akuntansi Pemerintah	23
3.2 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.....	27
B. Penelitian Relevan	29
C. Pengembangan Hipotesis	32
D. Kerangka Konseptual	34
E. Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37

B. Populasi Dan Sampel	37
1. Populasi	38
2. Sampel	39
C. Jenis dan Sumber Data	39
1. Jenis Data	39
2. Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Variabel Penelitian	40
F. Pengukuran variabel	41
G. Instrumen Penelitian	42
H. Uji Instrumen	43
1. Uji Validitas	43
2. Uji Realibilitas	44
I. Hasil Uji Coba Instrumen	45
J. Model dan Teknik Analisis Data	46
1. Uji Model	46
2. Teknik Analisis Data	46
K. Defenisi Operasional	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	51
B. Demografi Responden	52
C. Deskripsi Hasil Penelitian	54
D. Uji Validitas dan Reliabilitas	60
E. Uji Asumsi Klasik	61
F. Hasil Uji Model	64
G. Pembahasan	68
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	73
A. Simpulan	73
B. Keterbatasan	73
C. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
1. Kerangka Konseptual	35

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kajian Penelitian Sebelumnya	30
2. Daftar Instansi Pemerintah Daerah Kota Padang	38
3. Daftar Skor Jawaban Pernyataan Berdasarkan Sifat.....	42
4. Kisi-Kisi Instrumen penelitian.....	43
5. Uji Pilot Test Instrumen Penelitian	45
6. Tingkat Pengembalian Kuesioner	51
7. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	52
8. Jumlah Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	53
9. Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	54
10. Distribusi Frekuensi Kualitas Aparatur Penata Laporan keuangan	55
11. Disribusi Frekuensi Implementasi Standar akuntansi Pemerintah	56
12. Distribusi Frekuensi Pelaksanaan <i>Good Governance</i>	58
13. <i>Corrected Item-Total Corelation</i>	60
14. Nilai Cornbach's Alpha	61
15. Uji Normalitas.....	62
16. Uji Multikolinearitas.....	63
17. Uji Heterokedastisitas	64
18. ANOVA	65
19. Model Summary	66
20. Koefisien Regresi Berganda	66

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel	Halaman
1. Kuesioner	77
2. Uji Validitas dan Reliabilitas <i>Pilot-Test</i>	82
3. Uji Validitas dan Reliabelitas Data Penelitian	88
4. Uji Asumsi Klasik.....	94
5. Uji Regresi Berganda	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistik, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Landasan hukum bagi reformasi dibidang Keuangan Negara sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance* yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Ketiga Undang-Undang tersebut menjadi dasar pedoman dalam pengelolaan Keuangan Negara maupun keuangan daerah. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tanggal 13 Juni 2005

menjadi pedoman dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan pemerintah, pusat ataupun daerah.

Penciptaan *good governance* merupakan tuntutan yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembentukan pemerintah yang kuat, pasar yang kompetitif, dan *civil society* yang mandiri. Sebagaimana kita ketahui, tiga prinsip dasar dalam *good governance* selalu harus diperhatikan, yaitu partisipasi, transparasi, dan akuntabilitas.

Secara konseptual dalam Ratih (2010) pengertian *good* (baik) dalam istilah *good governance* (kepemerintahan yang baik) mengandung dua pemahaman. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek fungsional dan pemerintah yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Oleh karena itu dapat dikatakan *good governance* berorientasi pada dual hal yaitu, pertama pencapaian tujuan nasional, kedua pemerintahan yang ideal (efisien dan efektif) dalam melakukan pencapaian tujuan nasional.

Kepemerintahan yang baik atau *Good governance* merupakan pola hubungan yang sinergis antara komponen pemerintah (negara), swasta (bisnis) dan rakyat yang saling berinteraksi untuk melengkapi satu sama

lainnya dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan satu tujuan bersama yaitu kesejahteraan rakyat.

Peningkatan kualitas aparatur pemerintah sangat diperlukan dalam penyelenggaraan *good governance*. Oleh sebab itu dituntut aparatur pemerintah yang profesional, efektif, efisien, bersih dan berwibawa dalam melaksanakan tugasnya. Adapun aparatur pemerintah yang profesional ditandai dengan karakteristik adanya pengetahuan, kemampuan, keterampilan serta ketangguhan dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya dalam peningkatan kualitasnya terutama pada aparatur penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pihak penyelenggara pemerintah.

Salah satu perwujudan *good governance* itu sendiri adalah dalam penyajian laporan keuangan. Untuk menghasilkan laporan yang berkualitas dengan baik maka perlu penekanan pada pengukuran kapasitas para pemangku kepentingan. Terdapat tiga faktor untuk pencapaian penyusunan laporan keuangan yang baik yakni sumber daya manusia (*human factor*), lembaga (*institutions*), budaya (*cultures*). Namun yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah faktor sumber daya manusia dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dalam pelaporan keuangan maka, pelayanan kepada masyarakat otomatis akan terbangun lembaga yang kuat dan budaya yang sehat atau bersih. Sehingga dengan adanya penata laporan keuangan yang berkualitas maka akan mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut Manan (2004) dalam Kiki (2009) pelaksanaan otonomi daerah adalah terselenggaranya pemerintah yang *good governance*. *Good governance* akan menghasilkan birokrasi yang handal dan professional, efisien, produktif, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang diharapkan dapat diwujudkan dengan cara melakukan pembangunan kualitas sumber daya manusia agar lebih bekinerja tinggi dan lebih produktif sebagai pelaku *good governance*.

Sedangkan Simanjuntak (2007:1) mengemukakan penyiapan dan penyusunan laporan keuangan memerlukan sumber daya manusia yang menguasai akuntansi pemerintahan khususnya pada aparatur penata laporan keuangan. Karena itu pemerintah daerah perlu secara serius dalam perencanaan apratur penata laporan keuangan.

Selain diperlukannya sumber daya manusia yang berkualitas dalam penata laporan keuangan untuk mewujudkan *good governance*, hal penting yang juga sangat diperlukan adalah implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan *good governance*. Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Akuntabilitas menunjukan adanya kewajiban untuk melaporkan secara akurat dan tepat waktu tentang informasi yang terkait dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi merupakan keterbukaan informasi atas penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara partisipasi mendorong keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam pengambilan keputusan publik. Suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu seluas luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berperan serta atau berpartisipasi secara aktif, transparan, dan akuntabilitas serta jalannya pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika pelaksanaan *good governance* tidak berjalan dengan baik maka akan memungkinkan terjadinya suatu penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan sendiri.

Menurut Salam (2004:219) bahwa pemerintahan yang bersih dan baik pada umumnya berlangsung pada masyarakat yang memiliki *control social* yang efektif yang merupakan ciri dari masyarakat demokratis. Kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak biasa bertindak sewenang-wenang terhadap warga Negara termasuk didalamnya melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dikemukakan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuatan standar dalam akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Ada delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu : (1) basis

akuntansi, (2) prinsip nilai historis, (3) prinsip realisasi, (4) prinsip substansi menggali bentuk formal, (5) prinsip periodisitas, (6) prinsip konsistensi, (7) prinsip pengungkapan lengkap, (8) dan prinsip penyajian wajar.

Nazier (2007:4) mengemukakan penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi keuangan yang sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dimaksud dapat meningkat kredibilitas dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga *good governance* dapat tercapai.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ini adalah suatu hal yang sangat penting agar pengguna dapat menerapkan atau mengimplementasikan sistem akuntansi pemerintahan. Bila standar akuntansi ini tidak ada, maka dilapangan penerapan yang berbeda-beda dapat terjadi. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau penerapannya diperlukan dalam penyajian laporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada akhirnya *good governance* dapat dicapai.

Permasalahan pemerintahan yang baik atau *good governance* ini dapat dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. Pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2009

bertempat di Aula Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat, Maulana Ginting, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2008 kepada Ketua DPRD dan Wakil Walikota Padang. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2008 Kota Padang, BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), itu berarti peningkatan dari pemberian opini atas LKPD tahun lalu. Pemberian opini tersebut tidak terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhinya antara lain masih lemahnya sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan jumlah sumber daya manusia terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah terutama sumber daya manusia yang bertugas di Bagian Keuangan. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat menyampaikan agar Pemerintah Daerah dan Lembaga Perwakilan dapat melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin dan beriringan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Selain itu, laporan hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah agar segera ditindaklanjuti oleh DPRD dan dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja sehingga diharapkan untuk pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2009 sudah lebih baik dan secara bertahap dapat meningkatkan opininya

menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Khusus untuk laporan triwulan dan semester agar dapat disampaikan tepat waktu sehingga akhir triwulan III sudah didapat gambaran kegiatan-kegiatan pada triwulan IV. Seterusnya, saat awal tahun berikutnya DPKA sudah dapat mengkompilasi laporan keuangan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pada bulan Februari laporan keuangan sudah dapat diterima BPK (*sumber: www.goole.com*).

Dari fenomena tersebut, dapat dilihat bahwa kualitas aparatur penata laporan keuangan masih minim yang berlatar belakang pendidikan atau yang memahami akuntansi, sehingga dalam pelaporan laporan keuangan terjadi keterlambatan dalam pelaporan laporan keuangan, serta belum teraplikasinya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam penyajian laporan keuangan. Berhubungan dengan hal itu, tergambar bahwa dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah masih belum sepenuhnya menerapkan SAP, hal ini terlihat dari hasil audit BPK di atas.

Fenomena lainnya yang seringkali dijumpai, seperti sumber daya manusia yang tidak berkualitas, tidak disiplin, semangat kerja dan kesadaran atas tugas serta tanggungjawab yang rendah. Masih tingginya budaya korupsi, dan pemahaman yang rendah atas tugasnya sebagai pelayan publik, membuktikan kesan buruk wajah birokrasi saat ini yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). (*Padang Ekspres.com*).

Padahal, birokrasi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) khususnya di lingkungan pemerintahan kota Padang. Posisinya, birokrasi sangat menentukan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Yosi (2008) yang menguji Pengaruh Sumber Daya Manusia Penata Usaha Keuangan, Pembinaan dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Pelaksanaan *Good Governance* pada Kabupaten Agam. Hasilnya menunjukkan Sumber Daya Manusia Keuangan dan Pembinaan berpengaruh signifikan terhadap Standar akuntansi Pemerintahan, Serta Sumber Daya Musia Penata Usaha Keuangan, Pembinaan dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan *good governance*.

Selanjutnya dalam penelitian Sherly (2008) yang meneliti mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada pemerintahan kota Padang, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kota Padang secara implisit belum mampu menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya Dinas di kota Padang yang belum selesai dalam menyusun laporan keuangan. Serta adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah kota Padang, yaitu Sumber daya Manusia yang bukan dari akuntansi dan kurangnya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah kota Padang.

Berdasarkan fenomena dan teori-teori yang peneliti berikan, peneliti tertarik untuk mencoba melakukan penelitian mengenai sejauhmana pengaruh kualitas aparatur penata laporan keuangan dan implelementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap pelaksanaan *good governance* (GG). Penelitian yang penulis teliti saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian sebelumnya hanya melihat pengaruh penerapan *good governance* dari sisi penyajian laporan keuangan saja.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh faktor SDM aparatur penata laporan keuangan dan implementasi Standar Akuntansi Pemerintah terhadap pelaksanaan *good governance* pada Pemerintah Kota Padang, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kualitas Aparatur Penata Laporan Keuangan Dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Good Governance pada Pemerintah Kota Padang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Sejauh mana kualitas aparatur pemerintah berpengaruh terhadap *good governance* pada Pemerintah kota Padang.

2. Sejauh mana implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap pelaksanaan *good governance* pada Pemerintah Kota Padang.
3. Sejauh mana latarbelakang pendidikan mempengaruhi kualitas penata laporan keuangan.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu, seberapa besar pengaruh kualitas aparatur pemerintah dan implementasi SAP terhadap pelaksanaan *good governance* pada pemerintah daerah kota Padang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah maka pembatasan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauh mana kualitas aparatur pemerintah berpengaruh terhadap pelaksanaan *good governance* pada pemerintah daerah kota Padang.
2. Sejauh mana implementasi SAP berpengaruh terhadap pelaksanaan *good governance* pada pemerintah daerah kota Padang.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya literatur mengenai pengaruh kualitas aparatur pemerintah dan implementasi SAP pada pemerintah daerah kota Padang.
2. Bagi akademis, sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di Universitas Negeri Padang.
3. Bagi pemerintah, sebagai masukan dalam mewujudkan pelaksanaan *Good governance* yang baik dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan melaksanakan penerapan SAP secara konsisten pada pemerintah daerah kota Padang.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teoritis

1. *Good Governance*

Secara umum *good governance* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Tetapi meskipun istilah *good governance* sering disebut dalam berbagai kesempatan, istilah tersebut dimaknai secara berlainan. Satu sisi ada yang memaknai *good governance* sebagai kinerja suatu pemerintahan, perusahaan atau organisasi masyarakat. Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik maka diperlukan pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan terhadap tata kelola keuangan pemerintah.

a. *Pengertian Good Governance*

Governance merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses, dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka, serta menggunakan hak dan kewajiban mereka. *Governance* merupakan proses lembaga-lembaga publik mengatasi masalah-masalah publik, mengelolakan sumber daya publik dan menjamin realisasi hak asasi manusia. Dalam konteks ini, *good governance* memiliki hakekat yang esensial yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak berlandaskan pada pemerintahan hukum. Menurut Salam (2004:225).

Dalam Mardiasmo (2002:17) *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *United National Development Program*

(UNDP) memberikan pengertian *good governance* sebagai berikut “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *United National Development Program (UNDP)* Lebih menekankan aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengolaan urusan-urusan negara pada semua tingkat. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan dibidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Merujuk pada konsepsi tersebut, *good governance* memiliki beberapa atribut kunci seperti efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan sejajar serta mampu mempromosikan penegakan hukum. Di atas semua itu, atribut utama *good governance* adalah bagaimana penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam penyelesaian berbagai persoalan publik.

Dalam konteks itu, mekanisme kontrol (*check and balance*) perlu ditegakkan sehingga tidak ada satu komponen pun yang memegang kekuasaan absolut. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah dengan menegakkan akuntabilitas sistem, struktur, organisasi dan staf atas apa yang menjadi

tanggung jawab, fungsi, tugasnya yang antara lain terlihat dari perilaku dan budaya kerjanya (Wiranto (2000) dalam Idriansyah).

Sementara itu *World Bank* Dalam Mardiasmo (2002:18) memberikan definisi *good governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. *World Bank* mendefinisikan *good governance* adalah:

”sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha”.

Dalam hal ini *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah, mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat.

Jika mengacu pada program *World Bank* dan *UNDP*, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Kata baik di sini maksudnya mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan karakteristik dasar *good governance*.

b. Karakteristik Good Governance

Dalam wacana *good governance*, tidak sedikit pihak yang mempertukarkan antara prinsip, unsur, elemen, dimensi, indikator, dan karakteristik tetapi maknanya merujuk pada hal yang sama. Istilah *good governance* diawali oleh tawaran badan-badan internasional, namun cita *good*

governance pada saat ini sudah menjadi bagian serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan ke depan.

Menurut Salam (2004:226) “*governance* merupakan seni kepemimpinan publik. Ada tiga dimensi *governance*, yaitu: (1) Bentuk rezim politik, (2) Proses di mana otorisasi digunakan dalam pengelolaan ekonomi dan sumber daya sebuah negara, (3) Kapasitas pemerintah untuk merancang, memformulasikan, dan mengimplementasikan kebijakan dan fungsi-fungsi pelaksanaan”.

Berdasarkan tiga dimensi di atas, ada empat kriteria yang membentuk *good governance*, yaitu: (1) legitimasi pemerintah (tingkat demokrasi), (2) akuntabilitas politik dan unsur-unsur pemerintah resmi (kebebasan media, transparansi pengambilan keputusan mekanisme, akuntabilitas), (3) kompetensi pemerintah untuk memformulasikan kebijakan dan pemberian pelayanan, (4) respek kepada hak asasi manusia dan aturan hukum (hak-hak dan keamanan individual dan kelompok, kerangka kerja kegiatan ekonomi dan sosial, partisipasi).

Menurut *United National Development Program (UNDP)* dalam Mardiasmo (2002:18) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi:

1. Partisipasi (*Participation*)

Setiap orang atau setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu

tatanan kebebasan berasosiasi dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Aturan Hukum (*Rule of Law*)

a. Supermasi hukum: di samping erat kaitannya dengan *rule of law* juga mengisyaratkan adanya jaminan bahwa suatu masalah diatur secara jelas, tegas dan tidak duplikatif, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Hukum yang responsif: hukum harus mampu menyerap aspirasi masyarakat luas dan mampu mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dan bukan dibuat untuk kepentingan segelintir elit.

c. Penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif: upaya yang mempersyaratkan adanya sanksi, mekanisme untuk menjalankan sanksi, serta sumber daya manusia/ penegak hukum yang memiliki integritas.

d. Independensi peradilan: yakni prinsip yang meletakkan efektifitas peradilan sebagai syarat penting perwujudan *rule of law*.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi baru harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya, dan informasinya harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat *monitoring* dan evaluasi.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

- a. Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat.
- b. Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan pengaduan.
- c. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- d. Tumbuhnya kesadaran masyarakat.
- e. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan berkurangnya jumlah pengaduan.

5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Dalam hubungan yang saling melengkapi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, pemerintah bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6. Berkeadilan (*Equity*)

Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya serta memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

- a. Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal.

- b. Adanya perbaikan yang berkelanjutan.
- c. Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja.
- d. Meningkatkan kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat.
- e. Berkurangnya penyimpangan pembelanjaan.
- f. Berkurangnya biaya operasional pelayanan.
- g. Prospek memperoleh standar ISO pelayanan.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*). Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, bergantung apakah jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau external. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.

9. Bervisi Strategis (*Strategic Vision*)

Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan manusia (*human development*), bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Mereka juga memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.

UNDP menjelaskan tata pemerintahan yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mengikutsertakan semua.
2. Transparan dan bertanggungjawab.
3. Efektif dan adil pada masyarakat.
4. Menjamin adanya suplemasi hukum.
5. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada *consensus* masyarakat.
6. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Asian Development Bank (ADB) melalui Krina menegaskan konsensus umum bahwa *good governance* dilandasi oleh empat pilar yaitu (1) *accountability*, (2) *transparency*, (3) *predictability*, dan (4) *participation*. Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pengelolaan yang baik sangat bervariasi, namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, salah satunya yaitu akuntabilitas yang dalam hal ini menyangkut untuk kepentingan publik.

Berdasarkan konsep-konsep di atas, jelas bahwa *good governance* mempunyai tujuan yang lebih efisien dan penggunaan *resources* yang ekonomis. *Good governance* adalah strategi untuk menciptakan institusi masyarakat yang kuat, dan juga untuk membuat pemerintah/publik. semakin terbuka, responsif, akuntabel dan demokratis. Akan tetapi konsep *good governance* jika dikembangkan akan menciptakan *modern governance* (baik *good 'national' governance* maupun *good local governance*) yang handal yang

tidak hanya menekankan aktivitasnya dalam kerangka efisiensi tetapi juga akuntabilitasnya dimata publik.

2. Kualitas Aparatur Penatausahaan Keuangan

Adapun yang dimaksud aparatur penatausahaan keuangan disini adalah orang-orang yang bekerja pada satuan kerja perangkat daerah. Mardiasmo (2007:4) mengemukakan penataan dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah seyogyanya dilakukan beriringan dengan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), tidak kalah pentingnya adalah penataan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM). Penataan kelembagaan perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan *check and balance* dalam pengelolaan keuangan Negara. Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu program prioritas pemerintah termasuk didalamnya sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan Negara.

Simanjuntak (2007:1) mengemukakan penyiapan dan penyusunan laporan keuangan memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. Karena itu pemerintah daerah perlu secara serius dalam perencanaan sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan. Sedangkan Sugianto (2007:1) mengemukakan keahlian, setidak-tidaknya pengetahuan akan sistem keuangan, perbendaharaan dan akuntansi pemerintahan diramalkan akan menjadi syarat uji kelayakan bagi calon pegawai negeri, kepala daerah, DPR dan DPRD di masa depan.

Bastisan (2002:33) mengatakan diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan

daerah itu sendiri. Sementara Sujono dalam Yosi (2008) mengatakan sesuai dengan ciri penting dari suatu daerah otonom yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya yaitu terletak pada strategi sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan dibidang keuangan daerah. Pemahaman aparatur dan pengalaman dalam pengelolaan keuangan merupakan pilar penyangga birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan namun yang penting adalah penerapan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pekerjaan, adapun hal itu terdiri dari adanya kesadaran diri (moral), pengaturan diri (etika) dan motivasi serta menerapkan budaya kerja unggulan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas aparatur perlu secara sinergis memadukan aspek-aspek mental spiritual, sikap tata pikir, profesionalis, rasionalitas dan keterampilan dalam rangka partisipasi dalam mewujudkan *Good governance*.

Banyak pihak yang memberikan pandangan dan pemahaman untuk mewujudkan terciptanya *good governance* yaitu tata pemerintah yang baik, bersih dan beribawa dimana kunci utama untuk memahami *good governance*: pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supermasi hukum, transparansi, peduli, berorientasi pada consensus, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, serta visi strategis. Erat hubungannya *good governance* dengan reformasi dan birokrasi akan dimaknai oleh peran yang dimainkan aparatur yang berada dalam birokrasi, dimana aparatur berperan sebagai fasilitator dalam birokrasi menuju terciptanya *good governance*. Dengan demikian, *good governance* akan terwujud apabila aparatur memerankan dirinya dalam berokrasi menurut prinsip-prinsip yang mendasari *good governance* itu sendiri.

Kasim (2008:33) dalam Emri (2010) pemerintah yang baik (*good governance*) mengharuskan berjalanya proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik pula, terutama dalam hal bagaimana meningkatkan kualitas para birokrat dalam menjalankan pelayanan publik dan terbebas dari praktek korupsi. Lebih lanjut agar proses pemerintahan berjalan dengan baik, Kasim (2008:34) dalam Emri (2010) mengemukakan perlu meningkatkan kualitas para birokrat terhadap beberapa prioritas, antara lain:

1. Prioritas peningkatan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas, bersih, dan beribawa.
2. Prioritas peningkatan disiplin dan hukum bagi aparatur pemerintah daerah.
3. Prioritas peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah.
4. Prioritas penataan struktur dan organisasi lembaga daerah.
5. Prioritas peningkatan sistem perencanaan pembangunan dan pemerintahan umum daerah.

Secara umum kualitas aparatur yang baik perlu di dukung oleh komitmennya yang tinggi, karena komitmen yang dilandasi oleh peran aktif, loyalitas, tanggungjawab, dan disiplin diri akan menuntun respon, pemikiran, potensi, wawasan dan kemampuan yang dimiliki oleh aparatur untuk terus berkembang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka *good governance*.

3. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan

a. Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Halim (2007:252) akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah dan tindakan. Pemerintah yang dimaksud mencakup pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten atau kota.

Menurut peraturan menteri dalam negeri No. 13 tahun 2006 pasal 1 entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran atau pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas suatu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Dalam peraturan pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan disebutkan laporan keuangan pokok pemerintah daerah terdiri dari: (1) laporan realisasi anggaran, (2) neraca, (3) laporan arus kas, (4) catatan atas laporan keuangan. Selain itu diperkenankan menyajikan laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan ekuitas.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 99 menyebutkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi menyampaikan laporan keuangan sehubungan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya, laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan

catatan atas laporan keuangan. Laporan tersebut disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Hal tersebut untuk kepentingan: (a) akuntabilitas, (b) manajemen (c) transparansi, dan (d) keseimbangan antar generasi. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Nazier (2007:4) mengemukakan penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi keuangan yang sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dimaksud dapat meningkat kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sehingga, *good governance* dapat tercapai.

Awami (2007:1) mengatakan keberadaan standar diharapkan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah. Masyarakat yang maju, investor, DPRD, pemerintah pusat sebagai pihak yang meminta laporan keuangan dengan dilandasi undang-undang dapat mendorong agar pemerintah daerah dapat menyajikan dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan standar. Pada akhirnya, laporan keuangan pemerintah

daerah benar-benar dapat dipakai sebagai wujud tanggungjawab pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sementara Mahmudi (2007:9) mengatakan fungsi utama laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan untuk pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Jika laporan keuangan yang disajikan buruk akan menyebabkan pengguna laporan keuangan memperoleh informasi yang salah dan menyesatkan, yang berakibat kesalahan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta berdampak buruk terhadap penyajian laporan itu sendiri.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut PSAP. PSAP terdiri dari sebelas pernyataan standar:

1. PSAP No 01 tentang Penyajian laporan keuangan;
2. PSAP No 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
3. PSAP No 03 tentang Laporan Arus Kas;
4. PSAP No 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;

5. PASP No 05 tentang Akuntansi Persediaan;
6. PSAP No 06 tentang Akuntansi Investasi;
7. PSAP No 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
8. PSAP No 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan;
9. PSAP No 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
10. PSAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan;
11. PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi

b. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (2006:33) delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

c. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

d. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

e. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.

f. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitas.

g. Prinsip Periodisitas (Periodicity)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

h. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal)

i. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

j. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

B. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain penelitian Sherly (2008) mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Padang dalam penyusunan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan. Adapun kendala yang dihadapi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan seperti sumber daya manusia yang bukan dari akuntansi dan kurangnya pelatihan-pelatihan yang dilakukan Pemko Padang.

Dalam penelitian Kiki (2009) menguji pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan terhadap penerapan *good governance* kota Solok. Penelitian ini bertujuan untuk melihat (1). Pengaruh partisipasi, (2). pengelolaan keuangan terhadap *Good Governance* dengan 37 SKPD yang ada di Kota Solok sebagai populasi penelitian total sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap penerapan *good governance* kota Solok, begitupun dengan pengelolaan keuangan terhadap penerapan *Good Governance*.

Dalam Penelitian Ratih (2009) tentang Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. Menunjukkan hasil adanya pengaruh yang signifikan positif antara penerapan *good governance* terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah dengan hasil $\text{sig } 0,005 < \alpha 0,05$ sehingga H_1 diterima, dan pengaruh yang signifikan dan positif antara penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dengan hasil $\text{sig } 0,001 > \alpha 0,05$ sehingga H_2 diterima.

Lain halnya dalam penelitian Enceng (2008) tentang Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dalam mewujudkan *good governance*, menunjukan hasil bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh signifikan dalam mewujudkan *good governance*. Dimana untuk mendukung aparatur yang berdaya guna perlu diadakan peningkatan kompetensi aparatur pemda agar pelaksanaan *Good Governance* dapat terlaksana.

Dalam penelitian Edi (2009) tentang Membangun kualitas layanan publik menuju *good governance* pada era otonomi daerah. Menunjukan bahwa kualitas layanan publik adalah salah satu faktor penentu terciptanya *good governance*.

Tabel 1
Kajian Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Variabel (X)	Variabel (Y)	Hasil
1.	Sherli Fardila (2008)	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Padang dalam penyusunan laporan keuangan	Penerapan standar akuntansi pemerintahan	Penyusunan laporan keuangan	Menunjukan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan. Serta masih banyak kendala yang dihadapi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan.
2.	Kiki Wardani (2009)	Pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah dan pengelolaan	Kinerja aparatur pemerintah daerah(X1) pengelolaan	Penerapan <i>good governance</i>	Menunjukan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah dan pengelolaan

		keuangan terhadap penerapan <i>good governance</i> kota solok.	keuangan (X2)		keuangan berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan <i>good governance</i> .
3.	Enceng, liestyodono BI, Purwani ngdyah MW (2008)	Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dalam mewujudkan <i>good governance</i> .	Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah	Mewujudkan <i>good governance</i> .	Menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh signifikan dalam mewujudkan <i>good governance</i>
4.	Edi Sutrisno (2009)	Membangun kualitas layanan publik menuju <i>good governance</i> pada era otonomi daerah.	Membangun kualitas layanan public	<i>Good governance</i> pada era otonomi daerah.	Menunjukkan bahwa kualitas layanan publik adalah salah satu faktor penentu terciptanya <i>good governance</i>
5.	Ratih Atika Putri (2009)	Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.	Penerapan <i>Good Governance</i> (X1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.	Menunjukkan pengaruh yang signifikan positif antara penerapan <i>good governance</i> terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, berpengaruh signifikan dan positif antara penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
6.	Yosi Febrina (2008)	Pengaruh Sumber Daya Manusia Penata Usaha Keuangan, Pembinaan dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Pelaksanaan <i>Good Governance</i> pada Kabupaten Agam	Sumber Daya Manusia Penata Usaha Keuangan (X1), Pembinaan (X2) Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (X3)	Pelaksanaan <i>Good Governance</i>	Hasilnya menunjukkan Sumber Daya Manusia Keuangan dan Pembinaan berpengaruh signifikan terhadap Standar akuntansi Pemerintahan, Serta Sumber Daya Musia Penata Usaha Keuangan, Pembinaan dan Implementasi

					Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan <i>good governance</i> .
--	--	--	--	--	---

C. Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan kualitas aparatur penatausahaan keuangan terhadap pelaksanaan *good governance*.

Penataan kelembagaan perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan *check and balance* dalam pengelolaan keuangan Negara. Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu program prioritas pemerintah termasuk didalamnya sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan Negara.

Adapun yang dimaksud aparatur penatausahaan keuangan disini adalah orang-orang yang bekerja pada satuan kerja perangkat daerah. Mardiasmo (2007:4) mengemukakan penataan dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah seyogyanya dilakukan beriringan dengan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), tidak kalah pentingnya adalah penataan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM).

Good governance dapat diwujudkan apabila didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Manusia yang berkualitas disini adalah aparatur pemerintah yang memahami konsep-konsep *good governance*. Leach dan Percy Smith (2001) dalam Yahnu dan Deden (2006) mengatakan bahwa *government* mengandung pengertian seolah-olah hanya politisi dan pemerintahlah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan sehingga, kita adalah penerima yang pasif. Sementara *governance* melebur perbedaan antara yang

memerintah dan yang diperintah karena keduanya adalah bagian dari proses *governance*.

Menurut Manan (2004) dalam Kiki (2009) Pelaksanaan otonomi daerah adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. Dimana *Good governance* tersebut akan menghasilkan birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang diharapkan dapat diwujudkan dengan cara melakukan pembangunan kualitas sumber daya manusia agar lebih berkualitas tinggi dan lebih produktif sebagai pelaku *good governance*.

Untuk mewujudkan *Good Governance*, diperlukan aparatur pemerintahan yang baik dan handal, yakni aparatur yang kondusif, responsive, dan adaptif. Karakteristik, diharapkan dapat diwujudkan dengan cara melakukan pembangunan kualitas sumber daya manusia agar lebih berkinerja tinggi dan lebih produktif sebagai pelaku *good governance*. Jadi kuat dugaan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pelaksanaan *good governance*.

2. Hubungan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap pelaksanaan *good governance*.

Amawi (2007) mengatakan keberadaan standar diharapkan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah. Masyarakat yang maju, investor, DPRD, pemerintah pusat sebagai pihak yang meminta laporan keuangan dengan dilandasi undang-undang dapat mendorong agar pemerintah daerah dapat menyajikan dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan standar. Pada akhirnya, laporan keuangan pemerintah daerah benar-benar dapat dipakai sebagai wujud tanggungjawab pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Hal tersebut untuk kepentingan: (a) akuntabilitas, (b) manajemen, (c) transparansi, dan (d) keseimbangan antar generasi. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang merupakan wujud dari pelaksanaan *good governance*.

Dalam penelitian Yosi (2008) tentang Pengaruh Sumber Daya Manusia Penata Usaha Keuangan dan Pembinaan serta Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Pelaksanaan *Good Governance* pada Kabupaten Agam. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Sumber Daya Manusia dalam bidang Keuangan dan Pembinaan berpengaruh signifikan positif terhadap Standar akuntansi Pemerintahan, Selain daripada itu Sumber Daya Manusia Penata Usaha Keuangan dan Pembinaan serta Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan *good governance*.

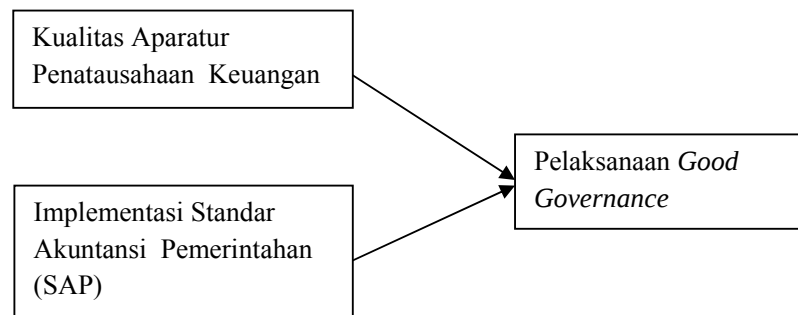
Salah satu karakteristik *good governance* adalah dengan adanya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan tersebut antara lain dilakukan dengan penerapan atau implementasi standar akuntansi pemerintahan secara konsisten. Dengan demikian, semakin baik penerapan atau implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) akan semakin baik akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang berarti semakin pula pelaksanaan *good governance*.

D. Kerangka Konseptual

Aparatur pemerintah daerah yang mempunyai latar belakang pendidikan dan memahami akuntansi masih sangat minim jumlahnya, penyiapan dan penyusunan laporan keuangan memerlukan Sumber Daya Manusia yang menguasai akuntansi pemerintah. Karena itu pemerintah daerah perlu secara serius dalam perencanaan SDM di bidang akuntansi dalam hal ini yang dimaksud adalah aparatur penatausahaan keuangan. Apabila aparatur pemerintah sudah memahami bidangnya maka penyusunan laporan keuangan dapat disusun sesuai ketentuan sehingga ini merupakan pelaksanaan *good governance* dapat diwujudkan.

Selain kualitas aparatur pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah diperlukannya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), karena dapat meningkatkan kualitas, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang merupakan elemen dari *good governance*.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka konseptual dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

E. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Kualitas Aparatur Penatausahaan Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap Pelaksanaan *Good Governance* pada pemerintah daerah Kota Padang.

H₂ : Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap Pelaksanaan *Good Governance* pemerintah Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Awami. Asad. 2007. *Transparansi Akuntabilitas Keuangan Daerah: 'Mati Angin' buat korupsi, melalui* ([http: // goegle. Com](http://goegle.Com)) (2/11/2010)
- Indra, Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta.: Erlangga
- Kiki, Wardani. 2009. *Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan Good Governance*. Skripsi UNP
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKTN
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Modul *Good Governance*. 2006. "Akuntabilitas dan Good Governace". Jakarta. Melalui (www.google.com) [30/10/2010]
- Nazier. M Daeng.2007. *Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan untuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah*. melalui (<http://ksap.org>) [2/11/2010]
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Salam, Dharmna Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintah Indonesia*. Jakarta:Djambatan
- Sherly, Fardila.2008. Penerapan SAP dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah di kota Padang. *Skripsi* . Padang. FE UNP
- Simanjuntak, Binsar. 2007. *Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan*. (<http://ksap.org>) [2/11/2010]
- Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2006. Jakarta: Sinar Grafika
- Sugianto. 2007. *Menyambut Era Baru Akuntansi Pemerintahan* (PP 24/2005)

Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Yosi, Febrina. 2008. Pengaruh Sumber Daya Manusia Penata Usaha Keuangan, Pembinaan, dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Pelaksanaan Good Governance Pada Pemerintah Kabupaten Agam. *Tesis*. FE-UNP.